



Kerjasama pemerintah Indonesia dan Singapura dalam pengelolaan wilayah kawasan ekonomi khusus era Joko Widodo-Jusuf Kalla (Periode 2015-2019)

Cooperation between the governments of Indonesia and Singapore in the management of special economic zones during the Joko Widodo-Jusuf Kalla era (2015-2019 Period)

Achmad¹, Fadillah Afrivo Nasir²

^{1,2}Universitas Fajar, Makassar

Email Correspondence: achmad@unifa.ac.id

Abstract

This research examines how the implementation and contribution of Indonesia-Singapore special economic zone cooperation on Batam, Bintan, and Karimun Islands in the era of Jokowi-Jusuf Kalla administration in 2015-2019. The research employs a qualitative descriptive method, with a library research approach by analyzing the phenomenon of developing special economic zones. The results of this study show that the development of a special economic zone between Indonesia and Singapore is a strategy of economic interest through a pattern of bilateral cooperation. The collaboration is manifested in the optimization of three regions, namely Batam, Bintani, and Karimun as investment land. Optimization is carried out with tax exemption as a form of facilitating investment services. In addition, special economic zones are also manifested in the concept of free trade in the three development areas (Batam, Bintan, and Karimun), whose contribution is in the form of growth of Gross Regional Domestic Product in each region.

Keywords: *Special Economic Zone (SEZ), Indonesia-Singapore, Bilateral Cooperation*

Pendahuluan

Hubungan bilateral antara pemerintah Singapura dan Indonesia terwujud dalam peningkatan kerjasama diberbagai sektor, seperti kerjasama politik, ekonomi dan sosial budaya. Hubungan kerjasama Indonesia dan Singapura di sektor perekonomian dapat terlihat dari peningkatan jumlah investasi dari masing-masing negara, khususnya investasi pengusaha Singapura di Indonesia (Direktorat Kerjasama ASEAN, 2020). Komunikasi

sesama pejabat pemerintah dan swasta antara kedua negara memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan hubungan kerjasama dan peningkatan investasi. Pemerintah Singapura melihat Indonesia sebagai salah satu tujuan penanaman modal dan memiliki daya tarik bagi pengusaha Singapura untuk berinvestasi. Sebaliknya bagi pemerintah Indonesia, Singapura menjadi mitra dagang utama, sumber investasi asing terbesar, dan juga pemasok wisatawan asing terbesar bagi Indonesia (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020). Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan salah satu strategi utama pihak Indonesia untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya saing internasional, terlebih lagi dalam upaya menarik minat para investor asal Singapura.

Secara historis, Kawasan ekonomi khusus (KEK) merupakan konsep yang diterapkan oleh negara-negara industri pada tahun 1950an. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan penetapan zona-zona yang terspesialisasi pada sektor manufaktur padat karya. Zona-zona yang terspesialisasi tersebut tidak hanya menarik perusahaan lokal, namun juga perusahaan multinasional yang notabene memiliki modal lebih besar (Hakim, 2018). Kawasan Ekonomi Khusus juga dapat didefinisikan sebagai kawasan khusus di Indonesia yang ditetapkan pemerintah untuk menjalankan perekonomian dengan peraturan dan fasilitas khusus (Karo et al., 2019). KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK akan menjadi basis bagi kegiatan industri, ekspor, impor, dan aktivitas lainnya dengan nilai ekonomi tinggi, untuk menunjang daya saing nasional. KEK terdiri atas satu atau lebih dari zona-zona berikut ini: pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, energi, dan zona ekonomi lainnya (Suryani & Febriani, 2019).

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam kontekstualisasi Indonesia menjadi kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyediakan pelayanan investasi yang berstandar internasional. Kerangka kebijakan penciptaan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Indonesia memuat beberapa regulasi diantaranya pembebasan pajak, pemberian fasilitas visa dan ijin kerja tenaga asing yang sederhana, serta pelayanan investasi yang memudahkan para investor untuk memperoleh seluruh perijinan dan kebutuhan dokumentasi dalam penyelesaian masalah yang mereka hadapi melalui pelayanan satu atap (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022).

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Pulau Bintan Dan Pulau Karimun, komplementaritas kepentingan ekonomi antara negara Indonesia dan Singapura, kawasan ekonomi khusus (KEK) didefinisikan sebagai suatu kerangka kerjasama antar pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura yang dalam penerapannya meliputi wilayah Batam, Bintan dan Karimun. Bentuk kerjasama tersebut telah dituangkan dalam draft kerjasama antara Indonesia dan Singapura dimana pada tanggal 25 Juni 2006 Presiden RI -Susilo

Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura – Lee Hsien Loong menyaksikan penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) kawasan ekonomi khusus untuk wilayah Batam, Bintan, dan Karimun.

Penetapan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) didasarkan pada asumsi pemerintah yang menilai kondisi infrastruktur di daerah tersebut telah memadai, besarnya jumlah investasi dalam maupun luar negeri di kawasan tersebut cukup besar, dengan lokasi yang sangat geografis dan strategis. Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di daerah Batam, Bintan dan Karimun menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi nasional (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018).

Kerjasama antara Indonesia-Singapura melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus merupakan fenomena kerjasama antar negara, yang akan menarik jika ditelisik secara mendalam menggunakan pendekatan konsep kerjasama internasional. Hal demikian dikarenakan pembangunan kawasan ekonomi khusus yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menjadi landasan dasar bagi pengembangan hubungan bilateral yang lebih terikat. Kerjasama Internasional hadir disebabkan relasi antar negara dalam pengelolaan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, terlebih dalam aspek masyarakat internasional.

Kerjasama internasional berorientasi pada pencapaian kebutuhan antar masing-masing negara yang menjalin kerjasama dengan cara konsensus-konsensus atau saling bertukar sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara (Pahlawan et al., 2014). Selain itu, pendekatan konsep perdagangan bebas perlu juga dilakukan dalam meninjau fenomena kerjasama pemerintah Indonesia dan Singapura dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK). Hal demikian disebabkan oleh besarnya kapasitas kepentingan ekonomi diantara kedua negara (Indonesia-Singapura) mendorong perlunya optimalisasi kegiatan ekspor-impor secara besar, sehingga pada wilayah sasaran pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) secara otomatis telah memenuhi konsep kawasan perdagangan bebas. Konsep perdagangan bebas erat kaitannya dengan penghapusan hambatan-hambatan dalam kegiatan perdagangan dan peningkatan fasilitas perdagangan (Zulyanto, 2016).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas persoalan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang lebih spesifik mengulas persoalan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) (Arjuna & Harto, 2016), serta keterkaitan pengembangan kawasan ekonomi khusus dengan diberlakukannya kawasan *ASEAN Community 2006-2017* (Hernawan, 2018). Selain itu, terdapat pula penelitian terkait kawasan ekonomi khusus di kota Batam yang berupaya menilai fenomena tersebut dengan pendekatan analisis persepsi stakeholder (Tampubolon, 2018), dan juga kaitannya dengan perspektif ekonomi pertahanan (Budiman, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka peneliti mengambil sebuah gap penelitian yakni belum ada yang secara spesifik membahas persoalan kerjasama Indonesia-Singapura dalam pengelolaan wilayah kawasan ekonomi khusus dengan sintesis analisis berganda belum dilakukan, terlebih lagi dalam kontekstualisasi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sintesis analisis berganda merupakan penilaian kritis terhadap sebuah fenomena menggunakan multi perspektif, dalam hal ini peneliti menggunakan konsep kerjasama internasional dan perdagangan bebas sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Penggunaan kedua konsep tersebut dalam membahas fenomena pengembangan kawasan ekonomi khusus bertujuan untuk menyediakan analisis yang bersifat holistik, sehingga mampu menyediakan informasi yang mapan bagi pengembangan kawasan ekonomi khusus di beberapa wilayah lainnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan fokus analisis akan didasarkan pada data-data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, internet, dan berbagai jenis publikasi resmi lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas, yakni persoalan kerjasama wilayah antara Indonesia dan Singapura yang terwujud dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus, selain itu menyajikan status wilayah Batam, Bintan, dan Karimun sebagai lokasi perdagangan bebas. Secara sistematis, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu (Sugiyono, 2016).

Data-data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan konsep kerjasama internasional dan perdagangan bebas, yang selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang sifatnya menggambarkan, memaparkan dan menguraikan objek yang diteliti (Suharsimi, 2013). Peneliti hadir dalam penelitian ini sebagai observator penuh yang mampu meneliti dan menganalisa data yang dikumpulkan, sehingga keterlibatan peneliti dapat menjelaskan rumusan permasalahan yang dijadikan topik utama dalam penelitian ini.

Pembahasan

Realisasi Kerjasama Indonesia-Singapura dan Perdagangan Bebas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Kawasan ekonomi khusus adalah suatu kerangka kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura dimana penerapannya berada di wilayah Batam, Bintan dan Karimun (Pahlawan et al., 2014). Bentuk kerjasama tersebut telah dituangkan dalam draft kerjasama antara Indonesia dan Singapura pada tanggal 25 Juni 2006 melalui penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) Kawasan Ekonomi Khusus oleh Presiden RI -Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura-Lee Hsien Loong. Selanjutnya pada tahun 2007, kawasan ekonomi khusus disempurnakan dengan penerbitan UU 44 tentang zona perdagangan bebas

(free trade zone) pada daerah Batam, Bintan, dan juga Karimun. Penetapan tersebut disebabkan keadaan ekonomi Indonesia berada pada fase *stuck* atau tidak mengalami kemajuan. Selain itu, penetapan tersebut juga dapat menjadi payung hukum. Lebih lanjut, terkhusus di daerah Batam, kebutuhan untuk segera menjadikannya sebagai kawasan *free trade zone* (FTZ) dikarenakan secara *de facto* daerah tersebut telah menjalankan aturan-aturan kawasan perdagangan bebas. Hal ini ditandai dengan berbagai insentif fiskal (*tax incentives*) terhadap kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke Batam.

Pemerintah Indonesia dan Singapura bersepakat untuk menjadikan wilayah Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK). Kesepakatan tersebut terimplementasikan dalam upaya kedua negara untuk meningkatkan investasi di wilayah Batam, Bintani, dan Karimun. Menindak lanjuti hasil MoU pada tahun 2006, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 45, 46, dan 47 menjelaskan secara rinci tatalaksana pengelolaan kawasan ekonomi khusus. Peraturan tersebut secara eksplisit membahasakan persoalan perpajakan, cukai dan kepabeanan yang dianggap mampu mendorong efektifitas kegiatan perdagangan di kawasan ekonomi khusus. Diterbitkannya beberapa aturan tersebut juga meneguhkan status kota Batam, Bintani, dan Karimun sebagai menjadi salah satu kawasan strategis nasional dan juga kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Operasionalisasi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas pada wilayah Batam, Bintani, dan Karimun telah menjadi komitmen pemerintah dalam menunjang efektifitas kawasan ekonomi khusus. Pelaksanaan kawasan ekonomi khusus, awalnya dirancang seperti pembentukan kawasan ekonomi khusus yang dilakukan oleh Cina dengan membagi wilayah ekonomi, perdagangan dan pariwisata. Oleh karena itu di wilayah Batam Bintan dan Karimun pelaksanaan kawasan ekonomi khusus juga dibagi dalam beberapa bentuk kawasan. Wilayah kawasan ekonomi khusus ini dibagi dalam beberapa bentuk (Malik, 2012).

Pertama, kawasan wisata terpadu berupa *Special Trade Zone* (Zona Perdagangan Khusus) di sebuah kawasan wisata di daerah Bintan. Daerah berpotensi adalah Lagoi, pulau Mapur, pulau Buluh, Trikora di wilayah Bintan, di wilayah Batam seperti Nongsa, pulau Nipah, Waterfront City serta di wilayah Karimun seperti daerah Pelawan, pulau Buru, Tanjung Balai, pulau Sugibawah dan beberapa daerah dan pulau di Tanjung Pinang seperti pulau Senggarang, pulau Penyengat dan kota tua Tanjung Pinang. Macau sebuah kawasan wisata terpadu (hotel, restoran dan perjudian) yang mendapatkan fasilitas STZ atau *Special Trade Zone* (Zona Perdagangan Khusus) istilah ini juga dipakai untk *Special Tourism Zone*. Konsep ini nyaris diterapkan di sebuah kawasan wisata di daerah Bintan, hanya saja terbentur dengan beberapa pihak yang tidak setuju adanya lokasi perjudian, padahal konsep ini tidak harus dihubungkan dengan perjudian karena tanpa perjudian konsep ini tetap akan bisa berjalan. Lagi-lagi masalah persepsi dan kurangnya sosialisasi yang menjadi penghambat penerapan konsep STZ atau lebih spesifik adalah kawasan wisata terpadu atau kawasan wisata terpadu eksklusif (KWTE).

Kedua, SIZ atau *Special Industrial Zone* (Zona Industri Khusus) kawasan industri yang paling banyak terdapat di daerah Cina (kabupaten) dari industri besar hingga industri rumah tangga. Maka tidak heran jika Cina termasuk negara industri dan pengekspor terbesar di dunia. Di Singapura dan Malaysia terdapat wilayah yang telah menerapkan SIZ. Konsep ini dapat diterapkan di daerah Lobam Bintan, kawasan industri di Batam, serta beberapa pulau yang memungkinkan dijadikan sebagai daerah industri. Sebagai catatan industri logistik dan perkapalan termasuk penopang terbesar pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau. Industri ini sudah dibangun di daerah Batam dan masih berpotensi besar untuk diperluas.

Peluang yang paling segera terlihat adalah bagi industri galangan kapal dan produksi peralatan dan jasa perminyakan. Sekitar 80 persen dari bisnis peralatan perminyakan di Indonesia sudah berlokasi di Batam seperti pembuatan pipa dan casing, konstruksi dan perekayasaan drilling rig. Terdapat pula potensi untuk mengembangkan lebih jauh industri yang terkait dengan perminyakan, seperti fasilitas pengilangan, pergudangan, dan petro kimia. Pengembangan KEK di Batam, Bintan dan Karimun akan menjadikan kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan yang keuntungannya akan dirasakan di pulau-pulau lainnya di Kepulauan Riau maupun wilayah lainnya.

Keberhasilan implementasi dari KEK di pulau-pulau ini juga akan menjadi contoh yang dapat ditiru oleh wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Alasan utama Pemerintah menetapkan Batam, Bintan dan Karimun sebagai KEK yang pertama adalah karena kondisi infrastruktur yang ada sudah memadai, besarnya jumlah investasi dalam dan luar negeri di kawasan itu, dan lokasi geografis yang strategis, sehingga sudah siap untuk dikembangkan sebagai KEK dalam waktu singkat (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018). Ketiga, SMZ atau *Special Mining Zone* (Zona Penambangan Khusus) adalah kawasan yang diberikan fasilitas khusus untuk mendukung kegiatan penambangan. Sebuah konsep baru yang dapat diterapkan di wilayah Bintan dan Karimun yang memiliki potensi besar dalam bidang penambangan.

Apabila fasilitas ini dapat diterapkan maka berdampak positif bagi investor lokal yang mampu memiliki kuasa pertambangan dan mengelolanya, karena salah satu tantangan dan hambatan bagi penambang lokal adalah tingginya harga alat-alat berat untuk penambangan yang juga dipengaruhi oleh adanya pengenaan pajak, sehingga hanya negara-negara maju yang dapat berinvestasi di pertambangan, padahal lokasi bahan tambangnya ada di wilayah Indonesia. Rencana pengembangan kawasan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau seluas kurang lebih 1.899 Ha. Bauksit adalah bahan baku aluminium. Tambang bauksit terdapat di pulau Bintan (Riau). Bauksit merupakan sisa dari deposit bauksit yang tersebar di Kecamatan Bintan Timur. Bahan galian ini telah lama dieksploitasi sejak zaman penjajah Belanda, terutama di Kecamatan Bintan Utara, Kab. Kepulauan Riau, Kundur, Kabupaten Karimun Nibem.

Terbentuknya zona perdagangan bebas Batam, Bintan, dan Karimun merupakan kebijakan pemerintah untuk menangkap peluang investasi asing langsung masuk ke tiga daerah tersebut. Salah satu hal yang berperan dalam kegiatan investasi adanya Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan kawasan ekonomi khusus. Sebagai usaha dalam merealisasikan kerjasama tersebut, telah dibentuk tim perumus *Joint Steering Committee* yang diketuai oleh Menko Perekonomian Republik Indonesia Boediono dan Menteri Ekonomi Singapura Lim Hing Kiang.

Sedangkan pelaksanaan kawasan ekonomi khusus dilakukan oleh *Joint Working Group* yang diketuai Menteri Perdagangan RI, Maria Elka Pangestu dan Ketua Pengembangan Ekonomi Singapura, Mr. Lim Siong Guan. Selanjutnya, dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus, terdapat juga badan pengelola yang tugasnya terfokus pada menarik investor ke daerah kawasan ekonomi khusus. Demi kesuksesan kawasan ekonomi khusus, berbagai aturan diberlakukan untuk mempermudah para investor yang ingin menanamkan modalnya di zona kawasan ekonomi khusus. Salah satu contoh, yakni persoalan perizinan dan fasilitas perpajakan seperti pembebasan bea dan cukai.

Dampak Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia-Singapura terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan investasi dan industri sangat penting dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, yang lebih penting lagi pemerintah mesti memperhatikan persoalan investasi dan industrialisasi yang berlangsung, serta pertanyaan mengenai siapa yang diuntungkan kebijakan tersebut. Hal demikian merupakan poin inti yang ingin dibahas pada bagian ini, yakni mengenai dampak kerjasama ekonomi Indonesia dan Singapura dalam pembentukan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus, yang didalamnya memuat strategi industrialisasi berbasis ekspor sebagai upaya menarik investasi. Hadirnya Kawasan Ekonomi Khusus memberikan peluang tercapainya kesejahteraan hidup bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di daerah Batam, Bintan, dan Karimun. Produk Domestik Regional Bruto merupakan indikator yang penting untuk mengetahui kondisi perekonomian daerah dalam suatu periode pembangunan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Dengan mengetahui PDRB suatu daerah, pemerintah dapat mengukur kemampuan dan kinerja suatu daerah pada periode tertentu.

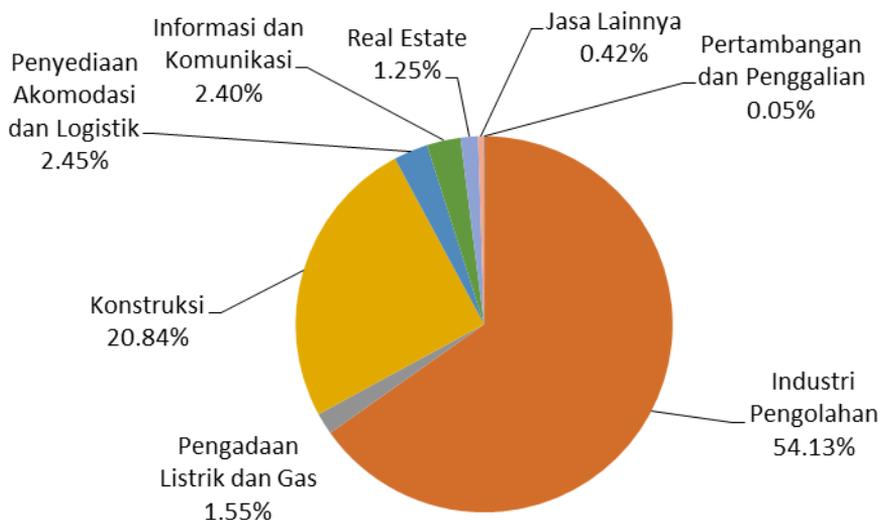
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Batam

Batam sebagai salah satu daerah pengembangan kawasan ekonomi khusus pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 164.484,02 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 13.198,87 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 151.285,14

miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Hal demikian juga menunjukkan bahwa selama tahun 2019 Batam mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,92 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data pada diagram 1, struktur perekonomian Batam hingga tahun 2019 masih didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan peranan sebesar 54,13 persen terhadap total PDRB. Peranan lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 53,75 persen. Lapangan usaha dengan peranan terbesar kedua adalah Konstruksi. Selama lima tahun terakhir, peranan kategori ini mengalami pergerakan yang terus meningkat. Hingga tahun 2019 peranan kategori Konstruksi mencapai 20,84.

Gambar. 1

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Batam 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batam

Berdasarkan diagram 1 mengenai Produk Domestik Regional Bruto Kota Batam, penulis mengambil kesimpulan bahwa model kawasan ekonomi di Batam sangat menarik untuk penanaman modal asing. Pengembangan kawasan ekonomi khusus di Batam didukung karena adanya keunggulan kompetitif dari segi geografis yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Selain itu, kerjasama Indonesia dan Singapura dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus memberikan dampak langsung bagi

eksistensi Singapura sebagai investor utama yang mampu mengalahkan Jepang dan Malaysia dalam aspek investasi di Indonesia.

Hal demikian mengindikasikan bahwa daerah-daerah yang masuk dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus telah menjadi tempat baru yang menguntungkan bagi kedua negara yakni Indonesia dan Singapura. Pemerintah terus mendorong wilayah tersebut menjadi tujuan investasi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Fakta tersebut terus mendorong potensi investasi Singapura ke Indonesia, terkhusus kota Batam.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bintan

Nilai produk domestik regional bruto Kabupaten Bintan atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2019 mencapai 21,30 triliun rupiah. Secara nominal, nilai produk domestik regional bruto mengalami kenaikan sebesar 1,70 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 19,59 triliun rupiah. Selama tahun 2019 Kabupaten Bintan mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,71 persen. Kenaikan produk domestik regional bruto tersebut murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha.

Tabel 1
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Bintan 2015-2019

	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertambangan dan Pengecilan	12,89	11,05	8,80	6,70	5,83
2	Industri Pengolahan	39,13	39,26	39,26	39,07	39,11
3	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,13	0,13	0,12	0,12
4	Konstruksi	16,17	17,19	18,59	20,75	21,84
5	Penyediaan Akomodasi dan Logistik	5,29	5,20	5,71	5,94	5,84
6	Informasi dan Komunikasi	1,17	1,17	1,16	1,15	1,15
7	Real estate	1,08	1,11	1,12	1,10	1,08
8	Jasa perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Jasa Lainnya	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan

Berdasarkan tabel 1, pada tahun 2015 peranan Industri Pengolahan sebesar 39,13 dan terus stabil diangka 39,11 hingga tahun 2019. Lapangan usaha dengan peranan terbesar kedua adalah Konstruksi, yang selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2015

hingga tahun 2019 peranan kategori Konstruksi terus meningkat, 16,17 persen pada tahun 2015 kemudian meningkat hingga 21,84 persen di tahun 2019. Pada tahun 2019 lapangan usaha sektor Pertambangan dan Penggalian sudah tidak termasuk dalam 5 (lima) besar penyumbang nilai tambah PDRB di Kabupaten Bintan dan digantikan oleh lapangan usaha sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Berdasarkan persentase pertumbuhan jenis lapangan usaha di kabupaten Bintan, hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif, kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang tiap tahunnya mengalami penurunan.

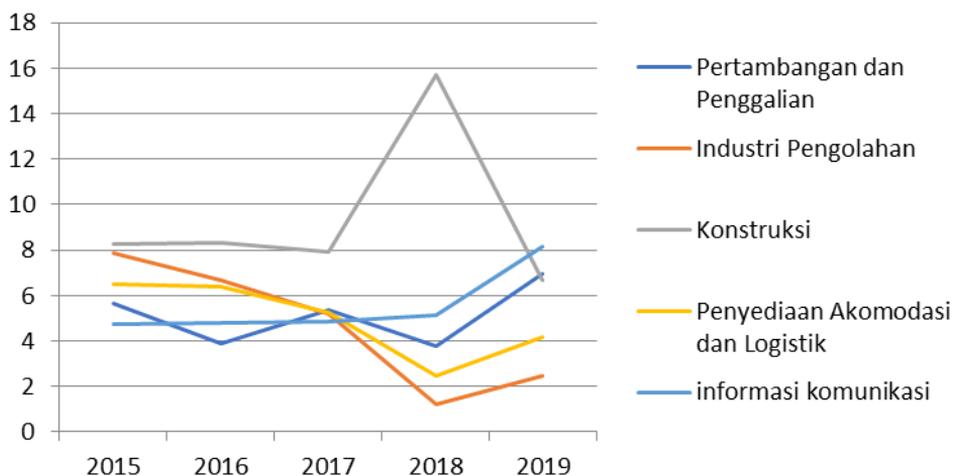
Jika dibandingkan angka pertumbuhan produk domestik regional bruto antara Batam dan Bintan sebagai kawasan ekonomi khusus memiliki perbedaan. Hal demikian dipengaruhi oleh penerapan pengembangan kawasan ekonomi dan perdagangan di kedua wilayah berbeda. Batam merupakan zona pengembangan yang sifatnya penuh penuh, sedangkan Bintan masih bersifat terbatas. Artinya, optimalisasi pengembangan hanya tertuju pada beberapa bagian kabupaten Bintan. Selain itu, pada kasus lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang tiap tahunnya mengalami penurunan disebabkan oleh tingginya biaya operasional, sehingga sangat sulit untuk penambang lokal ikut mengambil bagian dalam pengembangan lapangan usaha pertambangan. Padahal faktanya daerah Bintan merupakan daerah yang cukup strategis dalam pengembangan kawasan pertambangan khusus (*special mining zone*). Lebih lanjut, stabilnya angka pertumbuhan disektor konstruksi dan penyediaan akomodasi dan logistik, disebabkan oleh massifnya pembangunan hotel memiliki relevansi dengan kecenderungan pemerintah yang berfokus pada peningkatan sektor pariwisata di kabupten Bintan.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karimun

Nilai produk domestik regional bruto Kabupaten Karimun pada tahun 2019 mencapai 13,54 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 908,09 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 12,63 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha. Selain itu, angka tersebut juga menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Kabupaten Karimun mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,89 persen. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Jika merujuk pada deskripsi tersebut, ditemukan bahwa nilai produk domestik regional bruto Kabupaten Karimun pada tahun 2019 tetap meningkat meskipun mengalami perlambatan.

Gambar 2

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karimun 2015-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun

Selama lima tahun terakhir (2015- 2019) struktur perekonomian Kabupaten Karimun didominasi empat lapangan usaha, yakni sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, sektor konstruksi, jasa penyediaan akomodasi dan logistik, serta informasi dan komunikasi, yang memiliki peranan masing-masing terhadap pembentukan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto kabupaten Karimun. Meskipun terjadi beberapa penurunan drastis laju pertumbuhan di sektor konstruksi pada tahun 2018-2019, akan tetapi secara keseluruhan masih menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5.59 persen selama lima tahun terakhir. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yang mencapai 8,17 persen. Hal demikian disebabkan oleh gaya hidup masyarakat modern yang sulit untuk dipisahkan dari penggunaan media komunikasi digital dan internet. Lebih lanjut, perkembangan perekonomian kabupaten Karimun sebagai kawasan ekonomi khusus tidak terlepas dari kondisi sektor pertambangan. Hal demikian disebabkan karena Karimun menjadi salah satu daerah yang tergolong zona pertambangan khusus (*special mining zone*) karena memiliki potensi besar dalam penambangan. Meskipun demikian, kenyataannya pengelolaan sektor pertambangan masih belum stabil atau konsisten, hal demikian dikarenakan biaya operasional alat yang terbilang cukup mahal dan terdapat beberapa sumber daya alam yang tergolong sumber daya tak terbarui, sehingga menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan sektor pertambangan.

Kesimpulan

Pengembangan kawasan ekonomi khusus (*special economic zone*) merupakan salah satu strategi pemerintah Indonesia dalam upaya memajukan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Program kawasan ekonomi khusus diwujudkan dalam bentuk kerjasama dengan pemerintah Singapura. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan geografis dan potensi yang dimiliki Singapura dalam bidang teknologi yang merupakan modal atau kekuatan utama. Terdapat kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pemerintah dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus yang mendorong terjadinya perdagangan bebas antara Singapura dan Indonesia, seperti pembebasan dan penyederhanaan layanan pajak. Pengembangan kawasan ekonomi khusus dalam sudut pandang kerjasama internasional merupakan sebuah pola hubungan bilateral yang telah banyak di praktikkan oleh bebrbagai negara di dunia. Kawasan ekonomi khusus mengindikasikan aktifitas perdagangan bebas, sehingga pemerintah perlu memerhatikan secara kritis pihak-pihak yang diuntungkan dari kegiatan tersebut.

Daftar Pustaka

- Arjuna, D., & Harto, S. (2016). *Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura Dalam Realisasi Special Economic Zone (SEZ) di Batam, Bintan dan Karimun*. Riau University.
- Budiman, D. (2019). Status Free Trade Zone Kota Batam Dalam Persepektif Ekonomi Pertahanan. *JEKPEND: Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 2(2), 16–22.
- Direktorat Kerjasama ASEAN. (2020). *Mencermati Peluang Hubungan Kerjasama Bilateral Indonesia Singapura*. [www.Setneg.Go.Id](http://www.setneg.go.id).
- Hakim, I. (2018). *Kawasan Ekonomi Khusus*. Insanpelajar.Com.
- Hernawan, I. (2018). *Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura Dalam Pengembangan Special Economic Zone Di Wilayah Batam Bintan Dan karimun Setelah Diberlakukan Asean Economic Community Tahun 2006-2017*. Universitas Komputer Indonesia.
- Karo, L. N. D., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2019). Analisis Upaya Pajak, Efektivitas, Dan Kontribusi Pajak Daerah Di Kawasan Ekonomi Khusus Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 318–326. <https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26081.2019>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2018). *Indonesia dan Singapura Tandatangani Kerangka Kerjasama Ekonomi untuk Pulau Batam, Bintan dan Karimun*. [Kemlu.Go.Id](http://kemlu.go.id).
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). *Hubungan Bilateral Indonesia dan Singapura*. [Kemlu.Go.Id](http://kemlu.go.id).
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022). *Gubernur Kepulauan Riau Tandatangani Kerja Sama Energi Baru dan Terbarukan di Singapura*. [Kemlu.Go.Id](http://kemlu.go.id).
- Malik, D. (2012). *Kawasan Ekonomi Khusus Tingkatkan Investasi 10%-15%*.

- Www.Finance Today.Com.
- Pahlawan, I., Suyastri, C., & Prayuda, R. (2014). *Kerjasama Pemerintah Indonesia Dan Singapura Dalam Penetapan Kawasan Special Economic Zone Di Wilayah Batam Bintan Karimun (BBK)*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Suryani, N. I., & Febriani, R. E. (2019). Kawasan Ekonomi Khusus Dan Pembangunan Ekonomi Regional: Sebuah Studi Literatur. *Convergence: The Journal of Economic Development*, 1(1), 40–54. <https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v1i2.10902>
- Tampubolon, R. P. (2018). ANALISIS PERSEPSI STAKEHOLDER TERKAIT IMPLEMENTASI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) VERSUS FREE TRADE ZONE (FTZ) DI KOTA BATAM. *JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam)*, 6(2), 64–69.
- Zulyanto, A. (2016). Kesiapan Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 8(1), 29–45.